

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH

Rahmad Dian Afryansyah, Haryanto ¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aim of this research is to examine factors which predicted the level of accounting information disclosure in internet by local government. Factors which are going to be tested are size, investment level, wealth, political competition and press visibility. The population of this research are local governments of Indonesia. The number of samples is 47, calculated using Slovin calculation formula. Analysis method used to test hypothesis in this research is linear regression. The result of this study indicates that press visibility significantly has negative influence to the level of accounting information disclosure in internet by local government. It means that the local government resistance to provide accounting information to the media because the media's tendency is usually to explore the negative side of a local government such as the budget deficit and corruption. The other factors, such like size, investment level, wealth, and political competition do not influence the level of accounting information disclosure in internet by local government significantly.

Key words : the level of accounting information disclosure, local government, political competition, size, investment level, wealth, press visibility

PENDAHULUAN

Pada era informasi seperti saat ini, penggunaan media *internet* untuk menyampaikan informasi berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna *internet* di tengah masyarakat. Saat ini, *internet* sudah menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring dengan hal ini, banyak perusahaan yang sudah menggunakan *internet* sebagai media dalam menyampaikan informasi akuntansinya. Akan tetapi, hal ini sepertinya belum menjadi perhatian pihak pemerintah di Indonesia. Pada saat ini, *website* dari sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia justru kurang begitu diperhatikan, khususnya dari sisi pengungkapan informasi akuntansi. Di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah memang hanyalah sebatas menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan. Untuk pelaporan keuangan kepada masyarakat, hanya dilakukan secara sukarela. Akan tetapi, dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi.

Suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel semestinya mampu menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat. Komunikasi yang efektif berupa informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi sektor publik adalah penting bagian dari sistem itu sendiri. Dalam proses komunikasi, ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dan aksesibilitas sangat penting. Oleh karena itu, komunikasi dan teknologi informasi memiliki peran penting sehingga dapat mewujudkan prinsip transparansi sebagai indikator adanya kelola keuangan yang baik.

Salah satu bentuk transparansi yang dapat ditempuh pemerintah daerah ialah dengan mengungkapkan laporan keuangan secara sukarela di *internet* sehingga seluruh *stakeholder*

¹ *Corresponding author*

memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintahan. Pengungkapan sukarela laporan keuangan di *internet* dinilai efisien dan efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di *internet* diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi suatu pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya kepada masyarakat.

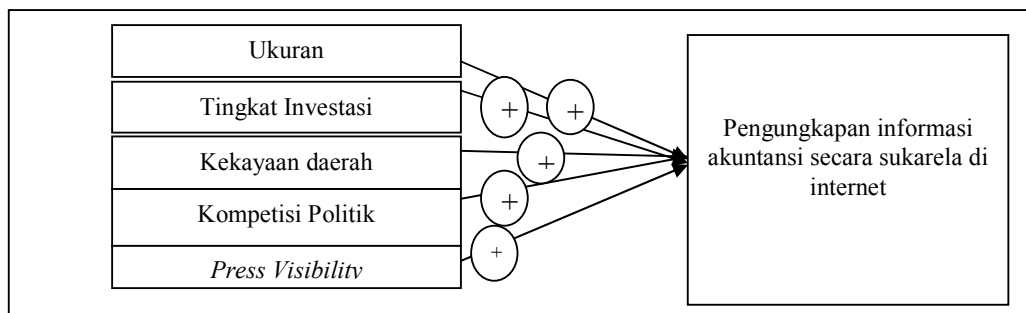
Penelitian yang menguji faktor-faktor yang menentukan tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* telah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan pelaporan keuangan di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah di Indonesia. Beberapa penelitian, seperti penelitian Laswad, dkk (2005), menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang menentukan pengungkapan sukarela di sektor publik. Hasil penelitian Laswad, dkk (2005) menunjukkan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, visibilitas pers memiliki hubungan positif dengan pelaporan keuangan di *internet* secara sukarela, sementara tipe pemerintahan district councils memiliki hubungan negatif dengan pelaporan keuangan di *internet* secara sukarela. Sedangkan hasil penelitian Ana Garcia (2010) menunjukkan hasil yang berlawanan dengan penelitian Laswad, dimana hasilnya menunjukkan hasil bahwa *press visibility* memiliki hubungan yang negatif dengan pelaporan keuangan di *internet* secara sukarela. Dari hasil pengamatan, kedua penelitian ini juga memiliki kombinasi variabel independen yang berbeda. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih menambah referensi atas faktor-faktor yang menentukan tingkat pelaporan akuntansi secara sukarela oleh pemerintah daerah, khususnya di Indonesia yang memang belum banyak diteliti. Dalam penelitian ini, karakteristik yang akan diuji ialah jumlah penduduk, kompetisi politik, kekayaan daerah, tingkat investasi, dan *press visibility*.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pelaporan keuangan melalui *internet* adalah salah satu cara untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (khususnya masyarakat) dengan biaya yang murah. Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari *internet* sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Pada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di *internet* diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti dan mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari perbedaan yang ditemukan di dalam website, yaitu: faktor apa yang mempengaruhi pemerintah daerah secara sukarela melaporkan informasi keuangan pada situs *web*, dan, di antara mereka yang melakukan, apa yang menyebabkan beberapa dari mereka untuk mengungkapkan informasi lebih dari yang lain? (Garcia, 2010). Penelitian-penelitian ini memiliki perspektif teori keagenan, dan telah mengidentifikasi beberapa variabel yang menjelaskan kecenderungan untuk secara sukarela melaporkan informasi keuangan, seperti ukuran, kinerja sektor kegiatan, atau *leverage* (Garcia, 2010). Dipandang perlu adanya pengujian atas teori ini untuk mengetahui apakah hal ini dapat juga dilakukan pada sektor pemerintah khususnya pemerintah daerah di Indonesia.

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam suatu model berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Menurut Garcia (2010), ukuran suatu organisasi telah sering dianggap determinan variabel di belakang praktek akuntansi dan pelaporan keuangan. Organisasi besar akan menunjukkan asimetri informasi yang lebih besar antara manajer dan *stakeholders*. Sebagai konsekuensinya, biaya agen yang lebih besar akan timbul dari asimetri tersebut. Menurut Chow & Wong-Boren (1987), dalam upaya untuk mengendalikan biaya keagenan, organisasi besar akan lebih bersedia untuk mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil (dikutip oleh Garcia, 2010). Oleh karena itu, organisasi yang lebih besar diharapkan untuk menggunakan berbagai macam strategi pelaporan, termasuk pelaporan secara *online* melalui situs *web* mereka (Debreceeny *et al.*, 2002;). Dalam penelitian ini, ukuran suatu organisasi pemerintahan daerah dilihat dari jumlah penduduknya.

Di Indonesia, jumlah penduduk suatu pemerintah daerah cenderung berbanding lurus dengan tingkat kemajuan teknologi dan informasi pada suatu daerah. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung lebih modern dan banyak mengandalkan *internet* untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi tentang kinerja pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, cara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya adalah melalui *internet*. Kota besar juga mendapatkan keuntungan atas pelaporan keuangan melalui *website* jika melihat kenyataan bahwa kota besar memiliki lebih banyak staf ahli yang bisa mengembangkan lingkungan situs *web* dengan baik dan secara berkesinambungan terus menjaga informasi yang harus diperbaharui. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah penduduk suatu pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah

Pengaruh tingkat investasi terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Biasanya, *leverage* entitas sektor publik dapat dibenarkan jika digunakan untuk kebutuhan melakukan investasi yang membantu peningkatan kesejahteraan warga (Garcia, 2010). Banyak penduduk memiliki sikap positif terhadap proyek-proyek publik yang membutuhkan investasi, karena mereka memahami bahwa proyek ini akan meningkatkan kondisi hidup mereka. Dengan melihat anggaran setiap kota pada tahun pemilihan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa politisi memiliki kepentingan dalam memulai investasi proyeknya yang ambisius dengan harapan dapat menangkap pemilih sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, tampaknya masuk akal untuk mengharapkan bahwa para pembuat kebijakan yang terlibat dalam proyek dengan investasi yang signifikan akan sangat tertarik dalam menyebarkan informasi ini seluas mungkin. Pelaporan keuangan pada *website* dapat membantu untuk menyoroti manfaat dari investasi dengan efisien. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat investasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah

Pengaruh kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Suatu entitas yang memiliki kekayaan besar akan meningkatkan kompetisi atas suatu jabatan public (Laswad, dkk 2005). Hal ini akan mendorong pemerintah daerah yang saat ini berkuasa untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang pemenuhan janji-janji politiknya dahulu, dengan memberikan informasi tentang kinerjanya kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah pengungkapan informasi akuntansi melalui *internet*.

Besarnya kekayaan daerah juga berbanding lurus dengan kepedulian masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah. Kota dengan tingkat kekayaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pemantauan politik dan informasi yang lebih tinggi atas gambaran tentang kinerja pemerintah daerah (Tennyson 2007). Seiring dengan masyarakat yang sudah sangat mengenal *internet* saat ini, kecenderungan memanfaatkan *internet* sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang kinerja

pemerintah daerah juga meningkat. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah

Pengaruh Kompetensi Politik terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah

Setelah terpilih, politisi biasanya mengabaikan janji-janji pemilu yang dibuatnya dulu tanpa hukuman langsung. Namun, perilaku oportunistik ini mungkin akan berkurang jika ada oposisi yang kuat untuk memantau kelompok yang ada di pemerintah. Rival politik dalam hal ini akan meminta untuk menginformasikan opini publik apapun terkait dengan penyimpangan dalam tindakan pemerintah dari janji-janji pemilu dibuat. Oleh karena itu, pihak oposisi ini berfungsi untuk menahan deviasi kepentingan antara pemilih dan politikus (Zimmerman, 1977). Akibatnya, pembuat kebijakan mungkin memiliki kepentingan dalam menjaga janji dibuat untuk pemilih jika mereka ingin dipilih kembali. Tentu saja, dengan tingginya faktor ini maka semakin besar tingkat persaingan politik (Baber, 1983 dalam Laswad,dkk 2005). Strategi komunikasi juga memainkan peran di sini. Jika kelompok yang mengatur ingin memenuhi komitmennya, tentunya akan tertarik menggunakan semua media pelaporan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada warga (Baber & Sen, 1984 dalam Laswad,dkk 2005). Website mungkin menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk pelaporan informasi (Laswad dkk, 2005).

H4 : Kompetensi Politik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah

Pengaruh press visibility terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah

Media memainkan peran sebagai moderator dalam hubungan keagenan antara pemilih dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hubungan ini mungkin memiliki pengaruh pada tingkat pelaporan informasi keuangan. Di satu sisi, pengungkapan informasi akuntansi dapat melayani tuntutan informasi dari media. Di sisi lain, pengungkapan informasi akuntansi mungkin berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang digunakan oleh politisi untuk mengontrol data yang akan diterbitkan pers (Ingram, 1984). Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki tekanan dari media lebih besar akan mengeksplorasi penggunaan beberapa saluran untuk pelaporan, termasuk *internet*, untuk menyebarkan informasi keuangan yang dijabarkan oleh orang-orang mereka sendiri (Laswad et al. 2005). Namun, media tidak selalu bertindak atas nama warga negara, melainkan mereka memiliki tujuan keuangan mereka sendiri. Untuk itu, media biasanya lebih memilih untuk menerbitkan berita yang menyajikan skandal dan korupsi untuk meningkatkan popularitas mereka. Kekhawatiran ini ditunjukkan beberapa waktu lalu oleh Zimmerman (1977): "pemantauan yang disediakan oleh pers tidak memastikan bahwa pejabat terpilih akan beroperasi dalam kepentingan terbaik konstituennya, tetapi hanya bahwa bentuk-bentuk perilaku tertentu akan dipantau lebih dekat daripada yang lain". Dengan memperhitungkan kekhawatiran ini, akan sering terjadi bahwa pers visibilitas pada pemerintah daerah terdiri dari berita yang berhubungan dengan anggaran dengan defisit yang tinggi, kenaikan beban pajak dan kesulitan dalam membayar utang, serta masalah keuangan lainnya. Akan tetapi, dengan faktor tersebut, pemerintah setempat mungkin saja justru akan semakin terdorong untuk melaporkan informasi akuntansinya melalui *website* dengan harapan hal ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa keadaan yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang diberitakan.

H5 : Press visibility berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel ini tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* akan diukur dengan metode *scoring* yang dikembangkan oleh Garcia (2010).

Adapun penilaian indeks *scoring* yang akan dilakukan dapat dilihat pada table 1. Setelah score didapatkan, maka akan kita bagi dengan nilai maksimalnya yaitu 16,5. Nantinya *scoring* ini akan memiliki nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1.

Variabel jumlah penduduk suatu pemerintah daerah dilihat dari jumlah penduduk yang ada di pemerintah daerah tersebut. Variabel tingkat investasi diukur dari nilai investasi pada laporan keuangan pemerintah daerah. kekayaan daerah diukur dari total asset yang dimiliki daerah. Kompetisi politik ini dapat diukur dengan menggunakan Indeks Herfindahl-Hirschmann yang dikembangkan oleh Herfindahl dan Hirschmann (1982) dengan rumus sebagai berikut :

$$H = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

dimana s_i adalah persentase perolehan suara suatu calon kepala daerah pada pemilihan umum dan N adalah jumlah calon kepala daerah.

Tabel 1
Indeks Scoring

Kategori	Uraian	Scoring
Informasi yang tercantum	Jumlah anggaran	1
	Neraca	1
	LRA	1
	LAK	1
	Opini Audit	1
	Kinerja	1
	Renstra	1
	CaLK	1
	Data Tahun Lalu	0,75
	Segment reporting	0,75
Format	PDF	1
	HTML	0,75
	Flash	0,75
	Excel	0,5
	PPT	0,5
	Word	0,5
Interaksi dengan pengguna	Email	1
	Forum	1
	Mailing list	1

Setelah indeks HHI diperoleh, maka hasilnya akan dibagi secara *inverse* sebagaimana pengukuran yang dikembangkan oleh Garcia (2010) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Inverse Kompetisi Politik} = \frac{1}{\text{Indeks HHI}}$$

Hal ini dilakukan dengan anggapan bahwa masing-masing kandidat memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, semakin tinggi nilai *inverse* indeks HHI, maka semakin kompetitif situasi politik yang terjadi di suatu daerah tanpa adanya pihak yang dominan. Adapun nilai minimal dari *inverse* kompetisi politik ini adalah 1 dan maksimal adalah 10. Sedangkan variabel *press visibility* akan diukur dengan jumlah quote pada *google* untuk setiap pemerintah daerah.

Pentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia, baik dari tingkat propinsi, kabupaten/kota. Jumlah pemerintah daerah di Indonesia ialah sebanyak 34 pemerintahan provinsi, 93 pemerintahan kota, dan 403 pemerintahan kabupaten. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun sampel yang nantinya akan digunakan, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti.

Kriteria tersebut adalah :

1. Pemerintah daerah telah memiliki laporan keuangan yang audited, dan datanya bisa didapatkan di BPK.
2. Pemerintah daerah memiliki *website* resmi.
3. Data hasil pemilihan kepala daerah bisa diperoleh dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum.

Penentuan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin, yang dikemukakan Yamane (1973) dengan nilai $e^2 = 10\%$, dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e^2 = nilai kelonggaran

415

$$n = \frac{415}{1 + (415 \cdot 10\%^2)}$$

$$n = 80,582$$

$$= 81$$

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ialah *Regression Linear*. Pemilihan *Regression Linear* dilakukan karena penelitian ini memiliki variabel dependen yang bersifat metrik dan variabel independen yang bersifat metrik dengan model regresi linear yang akan digunakan adalah :

$$\text{IFR} = \alpha + \beta_1 \text{Jumlah penduduk} + \beta_2 \text{Tingkat Investasi} + \beta_3 \text{Kekayaan Daerah} + \beta_4 \text{Kompetisi Politik} + \beta_5 \text{Press visibility} + \mu_i$$

Dimana :

IFR = indeks *scoring* terhadap *website* pemerintah daerah

α = Konstanta

Jumlah penduduk = Jumlah penduduk pemerintah daerah

Tingkat Investasi = tingkat investasi suatu pemerintah daerah

Kekayaan daerah = Total asset suatu pemerintah daerah

Kompetisi politik = indeks kompetisi politik

Press visibility = *Press visibility* dari suatu pemerintah daerah

μ = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian dan Statistik Deskriptif

Dari data yang terkumpul dan diolah didapatkan hasil pada Tabel 2, dapat diperoleh data bahwa jumlah penduduk pada suatu daerah yang terkecil dari sampel yang diteliti adalah sebesar 159.400 jiwa yaitu Kota Solok. Sedangkan jumlah penduduk terbesar adalah sebesar 2.336.500 jiwa yaitu Kota Bekasi. Adapun rata-rata jumlah penduduk adalah sebesar 856.987 jiwa. Dari nilai rata-rata tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk pada suatu daerah di Indonesia cukup besar. Hal ini menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi yang seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pengguna *internet* di suatu daerah.

Untuk variabel tingkat investasi, diperoleh data bahwa tingkat investasi yang terkecil dari sampel yang diteliti adalah Rp. 21.370,-/kapita. Sedangkan tingkat investasi terbesar adalah Rp. 235.863,-/kapita. Rata-rata tingkat investasi adalah sebesar Rp. 74.850,-/kapita. Jumlah ini menurut peneliti tergolong kecil dimana setiap penduduk yang berada di suatu pemerintah daerah hanya diberikan investasi untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya dengan nilai kurang dari Rp. 250.000,- per tahun. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap

investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Di sisi lain, pemerintah daerah yang bersangkutan juga tidak cukup memiliki alasan untuk mempublikasikan investasi yang dilakukan karena memang investasi tersebut tidak cukup besar dan menarik untuk diungkapkan ke masyarakat.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah penduduk	47	159.4	2336.5	856.987	485.1445
Total Investasi per kapita	47	21370.1	235863.7	74850.766	43618.4580
Kekayaan Daerah	47	1.E12	6.E12	2.31E12	1.195E12
Inverse Kompetisi Politik	47	1.422	5.188	2.77271	.884348
Press visibility/ kapita	47	.2	8.3	2.331	1.6797
IFR	47	.0000	.5758	.221169	.1656818
Valid N (listwise)	47				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2012

Untuk variabel kekayaan daerah, diperoleh data bahwa kekayaan daerah yang terkecil dari sampel yang diteliti adalah Rp. 1.023.868.708.779,- yaitu Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan kekayaan daerah yang terbesar adalah Rp. 5.724.747.483.945,- yaitu Kota Semarang. Rata-rata kekayaan daerah adalah Rp. 2.310.000.000.000,-. Menurut peneliti, nilai kekayaan rata-rata yang dimiliki pemerintah daerah ini tidak cukup besar, sehingga terdapat kemungkinan bahwa hal ini tidak cukup menimbulkan keingintahuan dari masyarakat atas kinerja pemerintah daerahnya dalam mengelola asset/kekayaan yang dimiliki.

Untuk variabel kompetisi politik, diperoleh hasil tingkat kompetisi politik yang terendah dari sampel yang diteliti adalah 1.422 yaitu Kabupaten Magelang. Sedangkan yang tertinggi adalah 5.188 yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Rata-rata kompetisi politik adalah 2.772. Angka rata-rata ini sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai maksimal 10 yang telah ditetapkan diawal dengan rumus *inverse* Herfindahl. Hasil ini memperlihatkan bahwa rata-rata persaingan politik di Indonesia tidak cukup kompetitif dan hanya didominasi oleh satu calon kepala daerah.

Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa, untuk variabel *press visibility*, diperoleh data *press visibility* yang terendah adalah sebesar 0,2 yaitu Kota Bekasi. Sedangkan yang tertinggi adalah sebesar 8,3 yaitu Kota Pekalongan. Rata-rata *press visibility* adalah 2,331 per kapita. Hasil ini memperlihatkan bahwa frekuensi masyarakat dalam mengakses informasi tentang pemerintah daerahnya cukup baik yaitu rata-rata 2,3 kali per penduduk. Hal ini berbanding lurus dengan rata-rata jumlah penduduk yang cukup besar pada masing masing daerah di Indonesia, dimana dalam hal ini diasumsikan bahwa jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah pengguna *internet* di suatu daerah.

Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa untuk variabel tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah, diperoleh hasil indeks tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* yang terkecil adalah sebesar 0.00 yaitu Kabupaten Jepara. Sedangkan yang terbesar adalah sebesar 0.5758 yaitu Kabupaten Kudus. Adapun rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* adalah sebesar 0.2212. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan nilai maksimal 1 yang ditetapkan berdasarkan penilaian *scoring*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memang sebagian besar *website* resmi pemerintah daerah di Indonesia belum dikelola dengan baik dan kurang begitu diperhatikan terutama dalam hal pengungkapan informasi akuntansi secara sukarela di *internet*. Hal ini cukup memprihatinkan, karena jika diteliti lebih lanjut, sebenarnya frekuensi akses dan jumlah pengguna internet di setiap daerah sudah cukup potensial apabila pemerintah daerah bersedia untuk mengelola *website* resminya dengan baik dan lebih memperhatikan masalah pengungkapan informasi akuntansinya dengan baik.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Pengukuran Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	.108	.111		.973	.336
	Jumlah penduduk	8.219E-5	.000	.241	1.488	.144
	Tingkat Investasi	5.543E-7	.000	.146	.903	.372
	Kekayaan Daerah	1.469E-14	.000	.106	.744	.461
	Kompetisi Politik	.022	.025	.117	.877	.386
	<i>Press visibility</i>	-.040	.015	-.406	-2.741	.009

a. Dependent Variable: IFR

Sumber : data sekunder yang diolah, 2012

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Padahal, berdasarkan sampel yang diteliti, rata-rata jumlah penduduk suatu daerah di Indonesia adalah sebesar 856.987 jiwa. Angka ini sebenarnya adalah jumlah yang cukup besar dan menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi yang seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pengguna *internet* di suatu daerah. Akan tetapi, faktor banyaknya jumlah penduduk ini ternyata tidak cukup mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya di *internet*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan teori agensi dimana seharusnya *agent* pada suatu kota yang lebih besar akan lebih bersedia untuk mengungkapkan informasi akuntansinya untuk mengendalikan biaya keagenan dalam rangka memperkecil asimetri informasi dengan *principal*.

Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Garcia (2010) dan Tennyson (2007) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil ini sejalan dengan penelitian Laswad, dkk (2005) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel tingkat investasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Jika diteliti berdasarkan nilai rata-rata tingkat investasi yang dilakukan oleh suatu pemerintah daerah yang hanya Rp. 74.850,-/kapita, dapat diperoleh kesimpulan bahwa mungkin pemerintah daerah tidak cukup termotivasi untuk mengungkapkannya kepada masyarakat karena mempunyai anggapan bahwa angka rata-rata Rp. 74.850,-/kapita ini masih terlalu kecil yang jika hal ini diungkapkan, tidak akan menimbulkan rasa keingintahuan di tengah masyarakat.

Hal ini tidak sesuai dengan teori agensi dimana seharusnya *agent* mengungkapkan informasi akuntansinya termasuk yang berhubungan dengan keputusan investasi karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan *principal* walaupun nilainya tidak besar. Sudah merupakan suatu kewajiban bahwa *agent* harus memberitahukan semua informasi dan kondisi yang ada pada suatu organisasi kepada *principal* untuk menghindari terjadinya asimetri informasi. Salah satu cara yang biayanya rendah adalah melalui *internet*.

Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Garcia (2010) yang menyatakan bahwa tingkat investasi berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Jika diteliti lebih lanjut dari hasil analisa statistik deskriptif diperoleh data bahwa untuk variabel kekayaan daerah, kekayaan suatu daerah di Indonesia rata-rata sebesar Rp. 2.310.000.000.000,-. Nilai kekayaan rata-rata yang dimiliki pemerintah daerah yang tidak cukup besar ini, sepertinya menyebabkan rendahnya keingintahuan dari masyarakat atas kinerja pemerintah daerahnya dalam mengelola asset/kekayaan yang dimiliki. Sebagai akibatnya, pemerintah daerah yang bersangkutan menganggap bahwa pengungkapan informasi akuntansi di *internet* oleh pemerintah daerah tidak terlalu diperlukan.

Jika dihubungkan dengan teori agensi, seharusnya pemerintah daerah selaku *agent* lebih transparan kepada masyarakat dalam mempertanggungjawabkan kekayaan daerah yang dikelolanya, walaupun nilainya tidak terlalu besar. Seiring dengan masyarakat yang sudah sangat mengenal *internet* saat ini, kecenderungan memanfaatkan *internet* sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang kinerja pemerintah daerah juga tentunya meningkat. Seharusnya hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi akuntansinya melalui *internet* sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat.

Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laswad, dkk (2005) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa variabel kompetisi politik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Dengan rata-rata kompetisi politik yang hanya sebesar 2.772 memperlihatkan bahwa persaingan politik di Indonesia tidak cukup kompetitif. Kebanyakan daerah memiliki calon pejabat daerah yang mendominasi suara pemilih pada pemilihan kepala daerah, sehingga hal ini tidak cukup menimbulkan kekhawatiran dari pejabat daerah yang sedang berkuasa jika janji-janji politiknya tidak dipenuhi dikarenakan tidak adanya saingan politik yang cukup kuat yang bisa melemahkan kekuasaannya. Sebagai akibatnya, pejabat daerah yang sedang berkuasa tidak terlalu tertarik untuk mengungkapkan informasi akuntansinya di internet. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel kompetisi politik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Keadaan kompetisi politik yang lemah ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan teori agensi dimana seharusnya kompetisi politik dapat menjadi faktor yang menentukan dalam memotivasi pejabat yang sedang berkuasa dan berperan sebagai *agent* untuk mengungkapkan informasi akuntansinya (salah satunya melalui *internet*) sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai *principal* agar posisinya tetap dipertahankan dan tidak digantikan oleh kompetitor politiknya.

Hasil ini juga bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Garcia (2010) yang menyatakan bahwa kompetisi politik berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil ini sejalan dengan penelitian Laswad, dkk (2005) yang menyatakan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa variabel *press visibility* memiliki justru pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah dengan nilai t sebesar -2,741. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang dibangun di awal penelitian bahwa *press visibility* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah justru enggan mengungkapkan informasi akuntansinya di internet dikarenakan adanya media yang memberitakan hal-hal negatif tentang pemerintah daerah yang bersangkutan. Fenomena ini seakan-akan membenarkan berita-berita negatif tersebut dan menimbulkan kesan bahwa berita negatif tersebut benar adanya.

Jika banyak hal negatif yang diketahui oleh masyarakat, tentunya masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pejabat yang sedang berkuasa. Hal ini dapat berakibat terhadap elektabilitas pejabat tersebut pada pemilihan kepala daerah di periode berikutnya. Seharusnya hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi suatu pemerintah daerah untuk meng-*counter* media dengan mengungkapkan informasi akuntansinya di internet untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang sisi positif dari pemerintah daerah. Namun, sepertinya hal ini tidak terjadi di Indonesia.

Akan tetapi, hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Garcia (2010) yang menyatakan bahwa *press visibility* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, hasil ini berlawanan dengan penelitian Laswad, dkk (2005) yang menyatakan bahwa *press visibility* justru berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya variabel *press visibility* yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Sedangkan variabel ukuran, tingkat investasi, kekayaan daerah dan kompetisi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan *press* membuat pemerintah daerah justru menjadi enggan mengungkapkan informasi akuntansinya di *internet*.

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan. *Pertama*, jumlah obyek penelitian yang belum memenuhi keadaan yang sesungguhnya. *Kedua*, model regresi hanya bisa menjelaskan 20% dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, dapat disampaikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel yang diolah hingga mendekati jumlah populasi. Disarankan pula untuk mencari populasi dalam lingkup yang berbeda seperti lingkup kementerian/lembaga. *Kedua*, diharapkan agar menambahkan variabel baru yang bisa menjelaskan secara signifikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini, model regresi hanya dapat menjelaskan 20% dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

REFERENSI

- Garcia, Ana Carcaba. 2010. "Determinant of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities", *Local Government Studies*, Vol. 36, No. 5, 679–695, October 2010
- Ghozali, Imam (2011), Aplikasi analisis *multivariate* dengan program IBM SPSS 19, Edisi 5, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Hendriksen, E and Breda, Michael F. 2001. *Accounting Theory*, 5th edition, USA, Irwin/McGraw-Hill
- Jorge, Susana. Local Government financial transparency in Portugal and Italy: a comparative exploratory study on its determinants. *Bridging Public Sector and Non-Profit Sector Accounting*, Juni 2011
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Lai, Syou-Ching. 2010. An Empirical Study of the Impact of Internet Financial Reporting on Stock Prices. *The International Journal of Digital Accounting Research*, Vol 10, 1577-8517, 2010



Laswad, F., Fisher, R & Oyelere, P. 2005. Determinants of voluntary Internet Financial Reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 24, 101-121, 2005

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi Offset

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*, Edisi Terjemahan 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat

Tennyson, Mack. 2007. "The accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet", *Journal of Budgeting, Accounting, and Financial Management*, 19 (1), 56-92, 2007